



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemkot Ancam Lapor Balik

BENGKULU, BE - Laporan dugaan pemerasan yang dilapor kontraktor proyek Alun-alun di kawasan Masjid At-Taqwa, PT Karya Duta Mandiri Sejahtera terhadap Wali Kota Bengkulu dan beberapa pejabat PUPR kota ke Kejaksaan Agung (Kejagung), membuat Pemkot geram.

Melalui konferensi pers di ruang monitoring center Dinas Kominfo Kota Bengkulu, kemarin (14/12), Pemkot menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan fitnah, dan mengklaim bahwa tidak ada unsur pemerasan kepada kontraktor dalam proyek alun-alun/berendo di Masjid At Taqwa tersebut.

Pemkot akan melaporkan balik karena dianggap tindakan pencemaran nama baik.

"Untuk saat ini Pak Wali namanya juga dicatut dalam dugaan pemerasan, tapi Pak Wali berharap masih ada itikad baik. Dan ada kemungkinan untuk dibawa ke ranah hukumnya," kata Plt Kepala Diskominfo Kota, Drs. Eko Agusriyanto MSi saat memverifikasi kejelasan kepada awak media, kemarin (14/12).

Dalam konferensi pers ini, Diskominfo juga menghadirkan mantan Plt Kepala Dinas PUPR kota, Benny Iwan yang merasa terancam dalam laporan tersebut.

Ia menyatakan tuduhan yang mengarah kepadanya adalah fitnah, dan ia menjamin bahwa tidak ada pemerasan terhadap kontraktor.

"Laporan itu adalah fitnah dan tidak benar," jelas Benny.

Ia menegaskan kepada pelapor untuk segera minta maaf dan mencabut laporan tersebut, jika tidak ada itikad baik tersebut maka ia akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kami akan rapat untuk melakukan langkah selanjutnya terkait laporan itu," ungkap Benny.

Diketahui, PT Karya Duta Mandiri melalui Kuasa Direktornya, Amirudin Murtuza melaporkan oknum konsultan pengawas, mantan Kadis PU Kota Bengkulu dan PPK proyek Alun-alun ke Jampidsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Kamis (12/12) lalu.

Dalam laporannya, kontraktor

merasa diperas dan dirugikan miliaran rupiah oleh oknum konsultan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengatasnamakan untuk Walikota Bengkulu.

Adapun total kerugian pihak kontraktor mencapai Rp. 2 miliar lebih dengan pemberian secara bertahap.

Persoalan ini bermula saat kontraktor mengajukan termin pembayaran 50 persen sejak 40 hari yang lalu, namun sampai sekarang tidak dibuatkan berita acara pembayaran dengan alasan konsultan dan PPK proyek belum mendapat uang dari sang kontraktor.

Padahal, pejabat PUPR tersebut sudah banyak meminta uang dari kontraktor hingga miliaran rupiah. Dengan belum dibayarnya termin 50 persen tersebut, sang kontraktor tidak bisa melanjutkan pekerjaan proyek

tersebut karena kelangkaan uang.

Menanggapi hal itu, Sabirin Taher juga mengakui dan membantah laporan tersebut. Dirinya menyangkal selama ini tidak menghambat proses pembayaran termin tersebut.

"Kami tidak ada menghambat termin, karena dalam aturan termin 40 persen boleh dicairkan setelah progress pekerjaan sudah mencapai 50 persen," ujar Asep.

Usai melakukan konferensi pers, Pemkot akan memverifikasi itikad baik dari pihak tersebut, sekaligus mempersiapkan upaya untuk membalas laporan itu.

Kemudian di hari yang sama dan tempat yang berbeda, Konsultan Pengawas proyek Alun-alun, Hendri Ag

bisan melalui kuasa hukumnya A Yamin SH MH juga menggelar konferensi pers.

"Kami ingin mengklarifikasi dan membantah bahwa isu itu tidak benar," sampai Yamin.

Pihaknya menduga motif pelaporan yang dilakukan pihak kontraktor ini karena sakit hati akibat kontraktor bersangkutan mengajukan termin kedua tetapi tidak disetujui konsultan pengawas.

"Di dalam kontrak syarat sudah mengajukan termin kedua itu pekerjaan fisik harus mencapai 50 persen dulu, sedangkan berdasarkan dari hasil rill penghitungan dilapangan baru selesai 44 persen," ungkapnya.

Pun demikian, pihaknya belum berencana untuk melaporkan balik atau melayangkan somasi, karena beberapa hari ke depan pihaknya masih ingin melihat sejauh mana laporan ini berjalan. (805)